

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

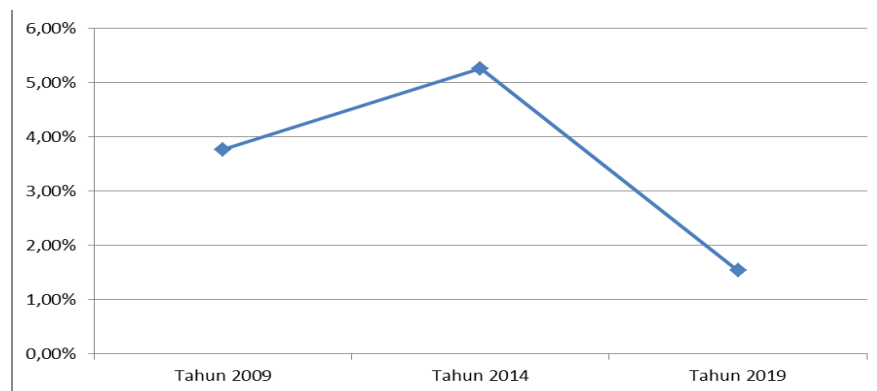
#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan arena pertarungan yang meliputi gagasan, konsep, ide dan juga sebagai pelaksana tujuan dalam sebuah ideologi sistem demokrasi terutama pada kelompok partai politik. Pemilu merupakan salah satu unsur yang mendasar dari partai politik untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan sistem pemilu, untuk itu partai politik berkerja keras demi mendapatkan suara maupun dukungan dari masyarakat dan ini merupakan salah satu tujuan dari partai politik sendiri yaitu dengan mendapatkan suara secara maksimal dan maju menjadi pemenang seperti apa yang telah menjadi tujuan utama terbentuknya suatu partai politik. Jika pemilu diistilahkan sebagai sebuah perlombaan, tentu suatu perlombaan terdapat kubu yang kalah dan menang dalam proses pelaksanaan sistem pemilu. Adanya sistem pemilu tersebut persaingan menjadi semakin sengit karena banyaknya partai politik yang bertarung dalam pemilu dan masing-masing partai ingin memenangkan pemilu tersebut untuk mendapatkan tujuan mereka.

Pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pemilihan umum pertama yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dalam memilih calon peserta anggota legislatif, calon presiden dan juga calon wakil presiden Republik Indonesia dalam masa priode lima tahun kedepan. Adapun beberapa

partai politik yang ikut serta dalam suatu perlombaan pemilu 2019 berdasarkan situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pemilu tersebut diikuti oleh beberapa partai seperti partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI. Dari beberapa peserta pemilu partai politik tersebut, terdapat partai yang tidak dapat lolos dalam syarat ketentuan pelaksanaan pemilu disebabkan karna suara yang diperoleh suatu partai itu belum mampu mencapai ambang batas yang telah ditentukan sehingga hal tersebut berdampak pada terpentalnya partai dari sedayan. Dimana ambang batas 4% lah yang menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan partai politik tersebut. Adapun partai yang tidak lolos ambang batas parlemen 2019 yaitu Partai Hanura, dimana Partai Hanura merupakan partai lama yang satu-satunya terpentel dari senayan. Dari data KPU RI, Partai Hanura hanya mendapat perolehan suara sebanyak 1,54% pada pemilu 2019. Berikut grafik perolehan suara Partai Hanura pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2019.

Gambar 1. 1 Suara Partai Hanura Pada Pemilu 2009-2019



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU (2009, 2014, 2019)

Berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Hanura pada pemilu 2019, ditemukan hasil yang menyatakan bahwa perolehan suara partai Hanura tidak mencapai ambang batas yang telah ditentukan. Dilihat dari perolehan suara pada pemilu 2009 Partai Hanura memperoleh suara sebanyak 3,77%. Pada pelaksanaan pemilu 2014 suara Partai Hanura mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 5,26% suara. Tetapi kenaikan perolehan suara tersebut tidak dapat dipertahankan pada pemilu 2019, justru pada pemilu ini Partai Hanura mengalami penurunan suara yang sangat drastis dari perolehan suara sebelumnya yaitu Partai Hanura hanya mendapatkan 1,54% suara. Hal ini tentu merupakan sebuah temuan yang menarik dimana Partai Hanura adalah partai lama dan partai satu-satunya yang tidak lolos ambang batas parlemen 2019 sehingga ini menyebabkan Partai Hanura terpental dari senayan. Dilihat dari sejarah Partai Hanura yang merupakan salah satu partai lama yang seharusnya telah mempunyai pertahanan yang kuat dalam pemilu justru terpental dari senaya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penelitian ini tertarik untuk melakukan kajian mengenai “Faktor penyebab Partai Hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan legislatif 2019”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini merumuskan permasalahannya adalah dalam hasil suara pada pemilu 2019 yang diperoleh oleh Partai Hanura tidak dapat memenuhi syarat minimum ambang batas parlemen 4%. Padahal Partai Hanura adalah parta lama yang seharusnya mempunyai pertahanan yang kuat dalam pelaksanaan pemilu, justru terpentak dari senayan, untuk itu penelitian ini menarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa saja faktor penyebab Partai Hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilihan Legislatif 2019?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab partai hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan legislatif 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Menurut penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian ilmiah bagi para akademisi dalam menelaah mengenai faktor penyebab partai politik tidak lolos ambang batas.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dalam bahan bacaan dalam memahami faktor penyebab partai politik tidak lolos ambang

batas pada pemilihan parlemen dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk penelitian tentang partai politik tidak lolos ambang batas. Sebagai rangsangan akademik untuk melakukan kajian-kajian selanjutnya dengan tema yang relevan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan 20 literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaharuan dalam penelitian ini. Literatur pada penelitian ini terbagi menjadi tiga klasifikasi. *Pertama*, kajian tentang Partai Hanura secara umum terdiri dari 1 artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mayrudin (2017). *Kedua*, kajian tentang turunnya suara Partai Hanura yang terdiri dari 11 artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jurdi (2019), Nasir (2016) Sholihah (2016), Permana (2019), Sadono & Fensi (2015), Ernel (2018), Ellenbroek, Meijers dan Krouwel (2019), Agusta (2018), Irwan, Yulianto, Lukmantoro (2014), Wahidin, Muhyidin, Iswahyuni & Ilmar (2020),

Simarta (2017). *Ketiga*, kajian tentang turunnya suara partai lain yang terdiri dari 8 artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triono (2015), Akmar (2019), Habibi (2019), Fajri & Fadhilah (2017), Ridha (2016), Sutisna (2016), Saputro (2016), Put, Schoultz & Isolato (2020).

Partai Hanura merupakan salah satu bagian dari partai tengah atau catch all party yang berformat pluralism, inklusif, dan non sekretarian. Adapun ideologi yang mereka miliki adalah Pancasila nasionalis religius. Posisi Partai Hanura sebagai catch all party ialah para elit yang tergabung dalam partai tersebut di perbolehkan untuk tidak distorsi politik dan politik tanpa alur. Tanpa adanya distorsi dan alur politik justru mampu membawa Partai Hanura sebagai partai yang kurang demokratis sebab refrensi partai yang seharusnya dan di tangani bersama oleh institusi justru di kendalikan oleh elit secara tidak langsung (Mayrudin, 2017).

Menurut Jurdi (2019) menjelaskan bahwa kegagalan Partai Hanura dalam lolos ambang batas politik mempengaruhi keterpilihannya di kalangan masyarakat, apabila calon memiliki citra buruk pada partai sebelumnya maka tidak menutup kemungkinan jika Partai Hanura mengalami lepas pandangan dari masyarakat. Dari penelitian ini di jelaskan jika Partai Hanura mengalami kegagalan akibat pergeseran kekuasaan yang terus menerus terjadi serta minimnya upaya Partai Hanura untuk meningkatkan rasa percaya terhadap masyarakat untuk memilih Partai Hanura lantaran kerap kali program yang di bentuk tidak sesuai atau bahkan tidak tepat sasaran. Sedangkan menurut Nasir,

Penurunan suara menjadi perubahan dalam sistem partai yang sebenarnya mampu menurunkan kualitas partai, selain itu terdapat pula ketidakmampuannya anggota partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga membawa krisis partai dan menjadi isu yang setara (Nasir, 2016). Krisis ini di latar belakang oleh para anggota partai yang tidak memiliki pengalaman politik dan mencalonkan diri hanya untuk jabatan bukan sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Konflik internal pada partai ternyata juga mampu mempengaruhi. Konflik internal kerap kali menjatuhkan partai politik ialah adanya dualisme kepemimpinan yang mengakibatkan kurang solidnya mekanisme kepengurusan partai. Meski partai telah memilih calon yang akan maju dalam pemilu, akan tetapi hal tersebut mampu menimbulkan permasalahan seperti timbulnya gimik dan saling tuduh satu sama lain sehingga membunuh karakter dari partai itu sendiri. Dualisme ini mampu membentuk perspektif dari pihak internal dan eksternal yang bertolak dengan perolehan suara di pemilihan berikutnya. Akibatnya anggota lain merasa ragu untuk tetap bertahan di partai tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk berpindah partai. Sedangkan di lihat dari perspektif masyarakat, partai tersebut tidak mampu mengelola sistem partai. Adanya keraguan inilah yang mengakibatkan hilangnya potensi partai (Sholihah, 2016).

Tidak hanya dualisme saja, media televisi sebagai ajang kampanye berlebihan juga telah dilakukan Hary Tanoë dan Wiranto yang berada di kubu

Partai Hanura untuk kepentingan politiknya. Dominasi iklan dan acara yang di sponsori oleh Partai Hanura pada stasiun televisi diketahui memiliki tujuan untuk menggiring masyarakat agar tertarik dengan partai tersebut dan memilihnya pada pemilihan umum. Meski di perbolehkan untuk melakukan kampanye di media televisi, akan tetapi seorang politisi sebaiknya tidak menggunakan kepemilikan pribadi untuk kepentingan politik yang sebenarnya melanggar peraturan kampanye. Akan tetapi dengan adanya dominasi ini justru sebagian masyarakat paham akan maksud dan tujuan paslon melakukan hal tersebut. Itu pula yang mampu mendasari masyarakat justru enggan untuk memilih paslon yang berstatus konglomerat sebagai penduduk kursi DPR (Permana, 2019). Selain di stasiun televisi, keberadaan Hary Tanoë ke dalam Partai Hanura serta promosinya di platform Okezone disebabkan portal tersebut merupakan milik dari Hary. Hary menggunakan portal media kepemilikannya sebagai media promosi dan kampanye besar-besaran pada saat pemilu tahun 2014 (Sadono & Fensi, 2015).

Pelaksanaan kampanye menjelang pemilu merupakan momen berharga bagi pasangan calon dan anggota partai lainnya untuk melaksanakan kegiatan promosi baik secara langsung atau bahkan melalui media internet atau televisi. Pada penelitian ini, penulis menjadikan Hary Tanoë sebagai objek penelitian yang telah melakukan 3 kali perpindahan mulai dari Partai Nasdem, Hanura, hingga Perindo. Pada setiap perpindahannya, Hary Tanoë melakukan kampanye dan promosi besar-besaran di media televisi untuk menarik perhatian



masyarakat atau penonton. Meski berniat untuk ajang promosi, akan tetapi dalam iklan atau acara mengenai promosi Perindo justru melakukan perbandingan dengan partai lainnya. Dengan adanya konten yang dinilai saling membandingkan satu sama lain mampu membuat masyarakat memiliki stigma bahwa Hary tidak memiliki konsistensi di perpolitikan. Ia di nilai hanya cenderung pada panggung politik, apabila mendapatkan kegagalan amka ia akan melakukan perpindahan ke partai lain dan melakukan hal yang serupa (Ernel, 2018).

Sedangkan menurut Ellenbroek, Meijers & Krouwel (2019) pemilihan umum yang cenderung memilih partai politik dengan melihat persamaan ideologi baik secara nasionalis atau keagamaan akan tetapi ada pula sebagian masyarakat yang memilih parlemen yang lebih sentripetal dan tidak terlalu berpolarisasi. Iklan politik mengenai Partai Hanura di adakan sebagai penyiaran yang bersifat transformative dan persuasif bertujuan agar asyarakat merasa tertarik dengan partai tersebut sehingga memilihnya dalam ajang pemilu yang akan datang melalui isi penyiaran yakni pihak-pihak yang menyalonkan diri, visi dan misi partai politik dan program yang di miliki. Selain meletakkan kampanye media di satelit berlangganan, ternyata pihak Partai Hanura pun memasang iklan politiknya di setiap channel televise yang di naungi oleh Media Nusantara Citra atau MNC group. Hal tersebut di karenakan kandidat dari Partai Hanura adalah pemilik dari MNC grup. Dari kondisi seperti ini dapat di lihat jika konglomerat memiliki kekuatan untuk mempromosikan dirinya pada

media-media yang di milikinya tanpa disadari bahwa mereka telah melewati batasan maksimum kampanye media yang telah di tetapkan dalam peraturan di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu (Agusta, 2018). Beredarnya acara di televisi sebagai propaganda politik yang di lakukan Partai Hanura memang bukanlah suatu kesalahan apabila di laksanakan sesuai dengan peraturan kepemilihan. Akan tetapi dengan adanya propaganda yang terselubung kampanye di dalamnya mampu membuat masyarakat kehilangan simpati sebab telah mengetahui teknik marketing dari suatu partai. Maka tidak menutup kemungkinan bila kegagalan partai akan datang sebab tindakan kecerobohan propaganda yang mereka lakukan justru menciptakan perspektif negatif dan berujung sia-sia. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memilih Partai Hanura sebab terlalu menunjukkan pecitraannya di publik (Yulianto, Lukmantoro & Widagdo, 2014).

Menurut Wahidin, Muhyidin, Iswayuni, & Ilmar (2020) bahwa setiap partai politik memiliki figur besar yang di jadikan mascot partai agar melahirkan kepercayaan publik atas kesuksesan dan telah figure tersebut raih. Akan tetapi figure besar belum tentu memberikan kepercayaan lebih di golongan masyarakat. Partai Hanura yang besar sebab didikan Wiranto juga memiliki permasalahan di dalam partainya. Sebagai fraksi pendukung pemerintah, Partai Hanura mengusulkan agar ambang batas pemilu berjumlah 20%. Akan tetapi, jumlah tersebut di nilai melanggar peraturan yang telah di tetapkan pada putusan MK/14/PUU-X1/2013 sebab mampu menyulitkan

incumbent apabila terdapat paslon yang mencalonkan dirinya kembali (Simarta, 2017).

Sementara itu, Triono (2015) menjelaskan bahwa penurunan suara juga terjadi pada partai islam. Karna disebabkan partai islam tidak menggambarkan ideologi yang mereka tanam dalam sistem politiknya, belum adanya kemampuan partai islam untuk mengelola nilai pembeda dikalangan pemilih serta adanya dukungan dan *now bailing effect* di antara kekuasaan sekuler dengan ideologi umat. Adapun alasan lain masyarakat enggan untuk memilih partai islam yakni munculnya berbagai kelompok anarks yang mengatas namakan agama islam sehingga masyarakat berpresoeaktif tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut terjadi bila mereka memilih partai islam. Dalam pendanaan dan sistem pun partai islam dinilai kurang maju dibanding dengan partai nasionalis lainnya. Latar belakang Partai PKS yang mengakibatkan penurunan suara pada ambang batas pemilu terjadi karna adanya perbedaan pandangan ideology, perpecahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) seluruh caleg PKS dan minimnya pandangan untuk masyarakat non muslim sebab kentalnya partai ini dengan ideologi islam (Akmar, 2019).

Sedangkan menurut Habibi (2019) menjelaskan bahwa penurunan suara di pemilu 2009 ialah adanya iklan yang memperingati hari guru nasional yang menampilkan 8 tokoh pendidikan. Hal tersebut mendapat pertentangan dari pihak lain sebab menyangkut kepentingan politik yang terselubung, yakni adanya jumlah guru yang tertera dalam iklan yakni 8 tokoh yang dominasi

politik sebagai berkampanye secara tidak langsung. Sementara itu menurut Fajri & Fadhilah (2017) menjelaskan dalam studinya, kegagalan PDIP terjadi karena minimnya pengelolaan media komunikasi secara maksimal, dan tidak mampu memainkan opini publik yang ada di masyarakat untuk menjangkau dukungan terhadap fraksinya. Selanjutnya adapun penyebab Golkar mengalami penurunan suara pada pemilu sebelumnya, yakni ketidak siapan publik untuk menerima partai Golkar yang kini mengubah stigma otoriter menjadi demokrasi. Partai ini pun juga dikenal sebagai partai manipulatif yang bersifat persuasif di kalangan masyarakat yang mengetahui seluk beluk partai Golkar dan kebiasaan turun termurunnya. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih partai lain di banding Golkar sebab adanya trauma di masa lalu di tambah lagi dengan partai yang baru bermunculan kini telah di gaungi oleh figure besar (Ridha, 2016).

Sedangkan menurut Sutisna (2016) kegagalan yang di alami oleh partai PDIP dan Demokrat ini tidak jauh berbeda, yakni kurang mampunya anggota untuk melakukan pengelolaan pemasaran atau marketing politik terhadap partainya sebab merela sudah merasa partai yang mereka tempati saat ini cukup dikenal masyarakat. Adapun isi dari pemasaran politik agar mendapati kenaikan atau pertumbuhan suara yakni mulai dari pemaparan produk partai yang berupa kandidat, program, prestasi dan profil partai yang di laksanakan secara berprinsip agar mampu mempertahankan kedudukan partai dalam pemilu. Terdapat pula penyebab penilaian buruk masyarakat sehingga memberikan akibat tindakan Demokrat yang dianggap tidak dapat konsisten dan tidak dinamis

sebab penurunan suara karena Demokrat telah mengeluarkan 5 anggota yang tidak sesuai dengan visi misi partai. pengeluaran anggota akibat ketidak saman visi misi ini tidak mencerminkan demokrasi seperti ideologi partai mereka (Saputro, 2016).

Penurunan suara di pemilu juga dapat di latar belakang oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan pada suatu negara atau daerah. Terpencilnya daerah-daerah di setiap negara serta minimnya jangkauan publik juga mengakibatkan mereka tidak mau untuk berpartisipasi dalam pemilu yang mengharuskan mereka untuk berkumpul di suatu tempat yang sekiranya jauh dari tempat tinggal mereka. Banyaknya golput yang ada di setiap pemilu ini memang tidak mempengaruhi secara signifikan pada setiap partai yang bersaing, akan tetapi mampu menurunkan kualitas ambang batas politik negara (Put, Schoultz, & Isolato, 2020). Berikut taksonomi literature review.

Tabel 1. 1 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Partai Hanura Secara Umum	Mayrudin, (2017).	Hanura merupakan salah satu bagian dari partai tengah atau catch all party yang berformat pluralism, inklusif, dan non sekretarian. Hanura mempunyai ideologi yaitu pancasila

			nasionalis religius.
<b>2</b>	Turunnya Suara Partai Hanura	Jurdi, (2019). Nasir, (2016). Sholihah,(2016). Permana, (2019). Sadono & Fensi, (2015). Ernel, (2018). Ellenbroek, Maijers & Krouwel, (2019). Agusta, (2018). Irwan, Yulianto & Lukmantoro, (2014). Muhidin, Muhyidin, Iswayuni & Ilham, (2020). Simarta, (2017).	Turunnya suara Partai Hanura disebabkan karna adanya faktor external maupun konflik internal, turunnya suara partai merupakan kegagalan akibat pergeseran kekuasaan yang terus menerus terjadi serta minimnya upaya Partai Hanura untuk meningkatkan rasa percaya terhadap masyarakat untuk memilih Partai Hanura lantaran kerap kali program yang di bentuk tidak sesuai atau bahkan tidak tepat sasaran dan juga ketidakmampuannya anggota partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga membawa krisis partai dan menjadi isu yang setara.
<b>3</b>	Turunnya Suara Partai Politik Lain	Triono, (2015). Akmar, (2019). Habibi, (2019).	Penuruna suara pada suatu partai juga terjadi karna kurang mampunya

		Fajri & Fadhilah, (2017). Ridha, (2016). Sutisna, (2016). Saputro (2016). Put, Schoultz & Isolato, (2020).	anggota untuk melakukan pengelolaan pemasaran atau marketing politik terhadap partainya, perbedaan pandangan ideology, minimnya jangkauan publik juga mengakibatkan mereka tidak mau untuk berpartisipasi dalam pemilu sehingga terjadi golput.
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Partai Hanura secara umum, turunnya suara Partai Hanura, serta yang terakhir turunnya suara partai lain pada pemilu. Maka untuk pembeda dalam penelitian kali ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang partai politik lama yang terpentat dari senayan pada pemilihan legislatif 2019, maka dari itu Penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada analisa “faktor penyebab Partai Hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilihan Legislatif 2019” dengan menggunakan teori yang diperkenalkan oleh Harmel & Janda (1994).

## **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan topik yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan diantaranya yaitu: teori perubahan partai (*party change*), teori partai politik, teori sistem pemilu.

## **1. Teori Perubahan Partai**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teori tentang perubahan partai atau *party change*. Peneliti menganggap bahwa teori perubahan partai telah sesuai dalam menemukan permasalahan yang berkaitan dengan partai politik, yaitu mengenai faktor penyebab Partai Hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan legislatif 2019 dengan mengacu pada teori dan juga hasil penelitian sebelumnya secara relevan. Teori perubahan partai merupakan suatu teori yang berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa partai mengubah strategi politik mereka ataupun karakteristik organisasi. Teori perubahan partai yang dikemukakan oleh Robert Harmel dan Kenneth Janda menyatakan bahwa perubahan tidak “terjadi begitu saja”, melainkan hasil dari perubahan kepemimpinan, perubahan faksi dominan di dalam partai, dan stimulus eksternal yang mendorong terjadinya perubahan. Teori perubahan oleh Harmel dan Janda ini memang tidak terlepas dari pengaruh beberapa teori sebelumnya bahkan dikatakan jika teorinya merupakan suatu campuran dan mencakup elemen dari beberapa teori pendahulunya, seperti teori dari Penebianco, Deschouwer serta Albinsson.



Harmel dan Janda membagi teori perubahan partai menjadi dua variabel yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal dalam teori perubahan partai Harmel dan Janda terdiri dari dua unsur yaitu perubahan kepemimpinan partai dan terjadinya perubahan faksi dominan. Sedangkan pada variabel eksternal terdapat beberapa indikator seperti reformasi konstitusional, ketersediaan dana publik, banpol, kelahiran partai baru dan strategi koalisi. Perubahan kepemimpinan memiliki penjelasan bahwa perubahan personel kepemimpinan partai dapat menjadi bagian dari komitmen yang luas untuk terjadinya perubahan. Perubahan kepemimpinan dapat didasarkan pada berbagai alasan misalnya pemimpin dapat diganti karena alasan personal, seperti keputusan untuk mengejar kepentingan lain (misalnya bisnis, keluarga), kesehatan yang buruk, usia (pergantian generasi) atau bahkan kematian. Selain itu perubahan kepemimpinan dalam tubuh partai politik dapat pula disebabkan oleh adanya konflik internal yang mengharuskan perubahan kepemimpinan itu terjadi.

Selain perubahan kepemimpinan, perubahan faksi dominan merupakan indikator kedua dalam variabel internal teori Harmel dan Janda. Hampir semua partai memiliki faksi yang dapat diidentifikasi di dalamnya. Bahkan pada nyatanya beberapa partai teridentifikasi sebagai kumpulan faksi-faksi yang bersaing. Jika faksi-faksi yang ada dalam suatu partai politik sangat berbeda dalam 'dasar-dasar identitas ataupun strategi, maka faksi (atau koalisi faksi) dominanlah yang akan memegang kendali. Tak hanya variabel internal, teori

perubahan partai juga menyorot adanya variabel eksternal berupa rangsangan eksternal yang menjadi faktor pendukung terjadinya perubahan partai. Rangsangan eksternal yang mendorong terjadinya perubahan partai mencakup banyak faktor misalnya reformasi konstitusional yang relevan, penyediaan dana publik hingga mengenai strategi koalisi (Harmel & Janda, 1994).

Penentuan strategi koalisi merupakan salah satu faktor eksternal yang menarik untuk diteliti. Dalam perbendaharaan politik, koalisi merupakan suatu gabungan dua atau lebih partai yang bergabung dengan tujuan untuk membangun suatu pemerintahan bersama. Koalisi merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menganut sistem multipartai yang tidak bisa dihindari (Setyadi, 2017). Muller dan Storm mengemukakan bagaimana dilemanya partai politik dalam membuat keputusan yang bersinggungan dengan konflik tujuan. Dilema tersebut muncul ketika tidak adanya mitra koalisi yang mempunyai ideologi yang serupa yang diperlukan partai untuk mendukung calon dalam membentuk pemerintahan. Dalam situasi dilema tersebut suatu pimpinan partai dan partai politik bisa saja mengubah perilakunya untuk mencapai tujuan yang berbeda (Hertanto & Sulaiman, 2013).

## **2. Konsep Partai Politik**

Secara umum partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Asumsi ini berjalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hamdi (2020) bahwa konsep

partai politik mendefinisi pada keyakinan sebagai kepentingan bersama dan memiliki ikatan yang kuat. kepentingan dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama. Adapun kebijakan alternatif suatu partai dalam meduduki jabatan publik adalah dengan meraih kekuasaan yang dianggap sah, legal, dan konsitusional. Adapun fungsi dari partai politik adalah sebagai mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat serta mampu mewujudkan harapan publik dalam kebijakan pemerintah. Di Indonesia, partai politik dinilai sesuai dengan nilai-nilai demokratisasi, yaitu pada sikap yang jujur dan adil saat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Al-Hamdi (2020) berdasarkan klasifikasi ideologis partai politik dibagi menjadi tiga spektrum utama yaitu:

- a. Nasionalis - Sekuler
- b. Nasionalis - Muslim
- c. Nasionalis - Islamis

Adapun alasan utama pada ketiga klasifikasi tersebut adalah:

1. Ketiga kekuatan pada klasifikasi ideologi tersebut merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia saat ini seperti abangan, santri, dan jemaah tarbiyah.
2. Ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama dalam aspirasi masyarakat baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.

3. Partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut mampu berpartisipasi secara berkelanjutan di parlemen baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Sedangkan menurut Budiardjo (2008) kelompok politik ini memiliki suatu tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik merupakan kumpulan dari beberapa manusia yang terkumpul dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di suatu negara serta menguasai sistem pemerintahan melalui ideologi tertentu agar mendapatkan kesempatan pada pemilihan umum sehingga mampu mewujudkan cita-cita politik negara secara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Labolo partai politik dapat berjalan apabila terdapat dukungan dari rakyat (Labolo & Ilham, 2015).

Secara idealis, partai politik ialah jembatan kehidupan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, dan perekonomian sebab salah satu tujuan dasar dari berdirinya partai politik yakni adanya rasa peduli antar sesama dalam memenuhi indikator-indikator pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan saran dan kritikan terhadap pemerintahan negara khususnya terhadap kebijakan yang di bentuk melalui partai politik sebagai media penyalur dengan penguasa baik di pusat atau bahkan daerah (Putra, 2004). terdapat 4 (empat) indikator dari partai politik, yakni (Mawazi, 2017):

1. Kemampuan partai politik dalam menyesuaikan diri yang dapat diukur melalui usia partai politik, usia generasi anggota partai politik, dan fungsi dari partai politik.
2. Kesederhanaan dan kompleksitas. Partai politik sudah selayaknya terbentuk dari ideologi yang sederhana agar mempermudah pelaksanaan cita-cita mereka serta kompleksitas partai dalam suatu kelembagaan negara terkait isu-isu yang ada.
3. Otonomi dan subordinasi mengenai partai politik yang tidak selalu bergantung pada prosedur dan tanggap terhadap tindakan publik yang di butuhkan.
4. Solidaritas partai terkait kesatuan yang ada di suatu kelompok agar menjadi utuh dan selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **3. Konsep Pemilu Legislatif**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu merupakan tujuan dari suatu kedaulatan rakyat sebagai proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun pemilihan Presiden dan juga Wakil Presiden, dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilakukan secara bersama, umum, jujur, rahasia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 yaitu dengan mengedepankan sikap yang adil kedalam Negara Kesatuan Republik Negara Indonesia. Andrew Reynold dalam (Labolo & Ilham, 2015) menyatakan bahwa pemilu merupakan tata cara dimana suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi pemilihan diubah menjadi perolehan kursi-kursi yang dimenangkan dalam dewan perwakilan atau parlemen.

Pendefinisian pemilu menurut Muhmud (2018) memiliki tujuan untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk mensukseskan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Selain untuk memilih kepala eksekutif, anggota legislatif atau parlemen juga dipilih melalui pemilu, dimana parlemen lah yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Hadimin (2015) pelaksanaan pemilu merupakan lambang atau tolak ukur dalam proses demokrasi yang sedang dijalankan di suatu negara, proses demokrasi yang digunakan ini menggambarkan pada sistem politik yang digunakan. Sistem pemilihan umum dalam ilmu politik memiliki beberapa macam jenisnya, adapun prinsip pokok dalam pemilihan yaitu seperti Multi-member Constituency dan Single-member Constituency. Multi-member Constituency merupakan pemilihan disuatu daerah pilih yang lebih dari satu atau beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau juga disebut sistem proporsional. Sementara pada Single-member Constituency adalah

pemilihan yang dilakukan di satu wilayah distrik atau daerah hanya memiliki satu wakil, wakil tersebut dapat disebut dengan distrik.

Oleh karena itu untuk menempatkan perwakilan yang nantinya dapat duduk di lembaga legislatif maka Negara Indonesia mengadakan pemilu legislatif yang menekankan pada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, seperti dalam pasal 20A ayat 1 UUD dimana rakyat diberikan kebebasan dalam menempatkan wakil-wakilnya sebagai representasi yang mengakomodasi kepentingan-kepentingannya. Artinya kedaulatan merupakan milik rakyat yang mencoba menyerahkan kepada rakyat untuk menempatkan wakil yang mempunyai klasifikasi sebagai anggota legislatif.

Pemilu legislatif merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat mulai dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota dengan harapan mampu membawa segala tuntutan dan membawa aspirasi rakyat ke dalam parlemen, dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perwujudan pelaksanaan demokrasi, menurut *International Commission of Jurist*, pada Tahun 1965 dibangkok, mendefinisikan sistem penyelenggaraan demokrasi “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*”. Selanjutnya definisi itu juga merumuskan demokrasi pemerintahan berdasarkan

pada perwakilan, seperti: pelaksanaan hak warga negara dalam melakukan pemilihan melalui wakil-wakil yang terpilih serta bertanggung jawab dengan melalui suatu proses pemilihan yang bersifat bebas (Azed, 2000:1). Berdasarkan sejarah, Pemilu di Indonesia sudah adakan sebanyak 12 kali, yaitu tahun 1955, 1966.

Dalam menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi di badan legislatif, pemilihan sistem pemilu merupakan hal yang sangat menentukan siapa yang terpilih dan juga partai mana yang akan meraih kekuasaan (Reynolds, Reilly, & Allis, 2005). Sebagai kompetisi politik, terdapat sejumlah aktor yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor mempunyai fungsi dan juga posisi berdasarkan kemampuan yang sama dengan mewujudkan pelaksanaan pemilu. Menurut (Sardini, 2011). Beberapa aktor tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Aktor Utama Pemilu

- a. Pemilih

Dalam konteks Indonesia, diantara aktor-aktor pemilu yang ada, posisi tersebut tidak lepas dari proses seleksi yang mengakibatkan posisi tersebut dapat tersingkir ataupun terpinggirkan. Daftar pelaksanaan pemilu tidak lepas dari perhatian khusus dalam pelaksanaan pemilu. Seharusnya dalam politik hak warganegara telah



dijamin dalam konstitusi, termasuk dalam hal itu adalah hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Adapun proses pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Bawaslu dan juga jajarannya, KPU beserta jajarannya.

c. Peserta Pemilu

Baik dalam pemilu eksekutif maupun legislative, partai politik selalu menjadi pelaku dominan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya pengiriman logistic di wilayah pemilu yang sedang berlangsung, keberhasilan tersebut dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan utama jika adanya dukungan yang baik dari pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan sangatlah penting dalam keberlangsungan pemilu. hal ini karena sangatlah mungkin terjadi pergesekan kepentingan diantara warga masyarakat.

a. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol jalannya aturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

b. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu terdiri dari badan hukum, LSM, adanya lembaga pemantau yang berasal dari luar negeri dan menghadirkan perwakilan dari negara yang mendukung Indonesia dalam kegiatan pemilu yang telah mendapat pengakuan dari KPU dan memperoleh akreditasi yang baik dalam melaksanakan proses pemantauan pemilu agar dapat berjalan dengan maksimal dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemilu tersebut, para aktor haruslah saling bekerjasama untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kerjasama yang dilakukan harus berdasarkan pada fungsi-fungsi yang sejalan dengan tujuan utama, agar penyelenggaraan pemilu tersebut berjalan secara maksimal.

### **G. Definisi Konseptual**

Konsep merupakan suatu istilah untuk menyatakan suatu keadaan yang akan diteliti serta didalamnya meliputi keadaan suatu individu ataupun kelompok yang menjadi obyek penelitian. Konsep pada penelitian ini meliputi:

1. Perubahan partai (*party change*) merupakan temuan untuk memberikan penjelasan terhadap partai politik mengenai perubahan strategi dan karakteristik suatu organisasi politik, dimana perubahan tersebut terjadi karna adanya perubahan kepemimpinan, perubahan faksi dominan di dalam partai, dan stimulus eksternal. Perubahan partai harus dilakukan secara maksimal untuk pencapaian tujuan yang akan dilakukan, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan pelaksanaan yang tepat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.
2. Partai politik merupakan ilmu yang berkaitan dengan ideologi suatu partai politik untuk mempertahankan, mendapatkan kedudukan atau merebut kekuasaan serta merumuskan keputusan politik sesuai tujuan utama yang bersifat konstitusional untuk merealisasikan cita-cita politik.
3. Pemilu Legislatif merupakan sebuah bentuk sarana dalam mendapatkan hak dan kewajiban bagi kedaulatan rakyat dalam memberikan suara kepada calon kandidat partai dengan mengutamakan asas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) yang diselenggarakan dari tingkat nasional, daerah maupun tingkat provinsi agar masyarakat dapat memberikan aspirasi melalui sistem pemilu sebagai perubahan bangsa agar lebih baik.

## H. Definisi Oprasional

Definisi oprasional sangat penting dalam menentukan indikator dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan melihat adanya definisi oprasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada didalam permasalahan tersebut. Hal ini tentu akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi suatu masalah serta penyelesaiannya. Berikut adalah definisi oprasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. 2 Indikator perubahan partai Harmel dan Janda

Variabel	Indikator	Alat Ukur
Internal	Perubahan Kepemimpinan	Apakah perubahan kepemimpinan dalam Partai Hanura pada pemilu 2019 disebabkan oleh alasan personal (urusan keluarga, bisnis, usia, kematian) atau karna ada konflik internal partai yang mengharuskan terjadinya perubahan kepemimpinan?
	Perubahan Faksi Dominan	Apakah Partai Haruna terjadi perubahan faksi dominan pada pemilu 2019?
Eksternal	Reformasi Konstitusional	Bagaimana dampak naiknya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) bagi Partai Hanura?
		Bagaimana dampak naiknya <i>presidential threshold</i> (ambang batas presiden) bagi Partai Hanura?
	Ketersediaan Dana Kampanye	Bagaimana cara Partai Hanura mendapatkan sumber anggaran dan diperoleh dari mana saja (banpol dan sponsor) pada pemilu 2019?

	Strategi Koalisi	Bagaimana pilihan strategi koalisi yang dijalankan Partai Hanura dalam menghadapi Pemilu 2019?
--	------------------	--

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan teori perubahan partai Harmel dan Janda (1994)

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya dalam melakukan rasionalisasi dan juga interpretasi atau penafsiran terhadap realitas kehidupan yang didasarkan pada apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian kualitatif bersifat elaborative dalam menggali informasi, yangnantinya informasi tersebut dapat digunakan untuk mempelajari dan menentukan tujuan penelitian dalam menemukan faktor penyebab Partai Hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan legislatif 2019. Dalam kualitatif penelitian empiris biasanya melibatkan sejumlah data lapangan ataupun bukti empiris yang menggambarkan suatu kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu: Naratif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus karna pendekatan studi kasus sangat relevan dengan topic yang Peneliti ambil.

Secara definitive, pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan dalam menyelidiki serta memahami satu, dua bahkan lebih dari suatu kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian, dibatasi oleh ruang/tempat, waktu. Dalam pengumpulan sumber data juga melibatkan banyak untuk mendukung pemahaman yang mendalam dan juga komprehensif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi 2020). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Terpentak Dari Senayan: Studi kasus terhadap Faktor Penyebab Partai Hanura Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Legislatif 2019.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan juga sekunder kepustakaan yaitu penelitian dengan mencari sumber datanya diperoleh berdasarkan dari data-data wawancara maupun kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan juga dikumpulkan untuk disajikan serta dianalisis data literature yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui website KPU, media online yang berkaitan dalam penelitian, dan juga website Partai Hanura dan juga didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan topic yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan dari Mantan Sekjen Hanura, Kuasa hukum Partai Hanura Kubu Ambhara dan Sekjen Partai Hanura. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui lembaga survei pemilu, artikel jurnal, undang-undang, serta buku-buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Taknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan cara teknik studi teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses interaksi yang terjalin antara pewawancara atau biasa disebut interviewer dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai/interviewer yang dilakukan melalui komunikasi langsung tatap muka ataupun secara daring atau online (Yusuf, 2014 : (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi 2020). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber antara kubu Osman Septa Odang dan kubu Daryatmo atau kubua ambhara. Dalam penelitian ini juga untuk mencari suatu data peneliti perlu melakukan pencarian data dengan cara pencatatan data yang sudah ada berdasarkan pada topik yang diangkat, seperti pada media online yang sebelumnya memiliki reputasi yang baik. Studi dokumentasi menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020:104) ialah suatu rangkaian pengumpulan data oleh peneliti melalui peninggalan arsip-arsip dan juga tentang buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan sebagai pengumpulan data yaitu dengan menggunakan sumber yang dapat dipercaya, seperti media online ataupun daring yang relevan dengan topik penelitian. Secara sederhana, penelitian ini fokus konsentrasi yaitu pada berita online yang berkaitan dengan Partai Hanura dari media yang bereputasi sebagai media utama.

#### **4. Teknik Analisis Data**

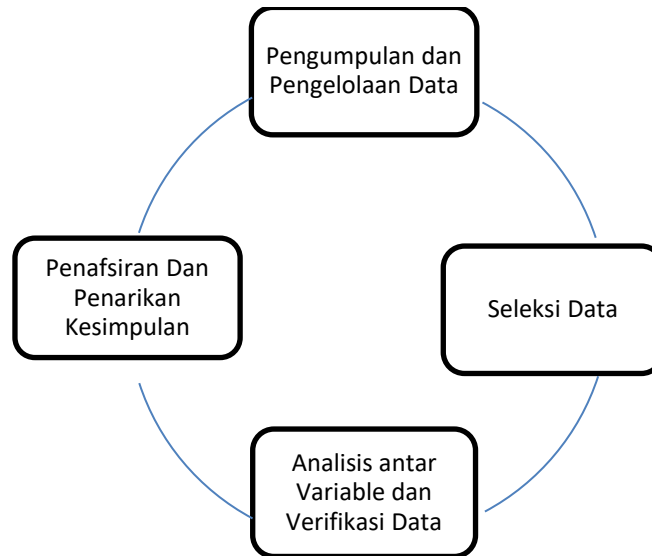
Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan dari pembahasan universal ke spesifik dengan cara menganalisa data. Menurut Bagdan & Biklen (dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi 2020: 123) bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya memperoleh data dan menyusun data secara sistematis yaitu seperti pengumpulan data melalui dokumentasi, catatan lapangan, wawancara dan lainnya, serta analisa data dilakukan dengan mengatagorisasikan data menjadi lebih spesifik dan detail. Sedangkan menurut Al-Hamdi,Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020:129) menjelaskan proses analisa data kualitatif dapat dilakukan melalui 4 langkah yaitu:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data : Pada langkah ini tahap pertama dalam analisa data setelah selesai pengumpulan data adalah mengelola data sesuai dengan kebutuhan peneliti dan data-data yang telah terkumpul selanjutnya dipilih berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- b. Seleksi data : Pada bagian ini peneliti akan memilih dan memilah data yang relevan untuk selanjutnya digunakan dalam proses analisa, baik berupa data deskripsi maupun data tabel maupun data gambar, dan menyisihkan data-data yang kurang relevan pada topik penelitian.



- c. Analisa antar-variabel dan verifikasi data : Pada langkah ini peneliti akan mengaitkan temuan satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Sebagai penentu apakah indikator tersebut saling terkait. Peneliti juga melakukan verifikasi data dengan mengonfirmasi kepada narasumber agar data yang diperoleh saling berkaitan satu sama lain.
- d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan : Pada langkah ini peneliti berusaha menafsirkan jawaban pada rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan analisis antar-variabel dan verifikasi data, kemudian peneliti merumuskan kesimpulan yang terdiri dari implikasi teoritis dan praktis dengan adanya saran dan rekomendasi oleh penelitian terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan pada topik penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, (2020) dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. 2 Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber: (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi, 2020)

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

**Bab I, Pendahuluan.** Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,

Definisi Konsepsional, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II, Gambaran Objek Penelitian.** Dalam bab ini akan dibahas tentang profil Partai Hanura.

**Bab III, Pembahasan.** Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai faktor penyebab partai hanura tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilihan legislatif 2019.

**Bab IV, Penutup.** Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.